*Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog
Refleksi Atas Pemikiran Plato, Aristoteles dan
Hannah Arendt*

Mikhael Dua

ABSTRACT. *As far as it develops, democracy has been practiced in many forms of civil states as the only way to reduce many forms of domination. The course of political history, however, shows that democracy is not the ideal form of the states, especially because it cannot be purified from the phenomena of the demagogues. The turn from democracy to tyranny can be explained from this point of view: democracy is the source of the demagogues. This paper will deal with the question of the relationship between democracy and the demagogues. By following Plato, Aristotle and Hannah Arendt who concern with the question of the essence of the politics, the paper brings forth the idea that the constitution of democracy should be developed into the constitution of the freedom of the people. In such a way, politics can be identified with the human togetherness.*

KATA KUNCI. Demokrasi, demagog, kebebasan, konstitusionalisme, filsafat Yunani

1. PENDAHULUAN

Oleh Samuel Huntington¹ perkembangan demokrasi dijelaskan tidak pernah berjalan mulus. Sekurang-kurangnya telah terjadi tiga gelombang yang selalu diakhiri dengan sebuah destruksi. Gelombang pertama terjadi dari 1828 hingga 1926, termasuk di sini revolusi-revolusi terhadap kerajaan-kerajaan di Eropa. Gelombang pertama ini memiliki motif modernisasi ekonomi dan kemerdekaan politik pada awal abad kedua puluh. munculnya Fasisme Mussolini pada tahun 1922 yang mengambil alih Italia dan perang dunia kedua yang menghancurkan banyak negara Eropa dan Amerika Latin merupakan dua peristiwa yang mengakhiri gelombang pertama demokrasi ini. Gelombang kedua berlangsung dari tahun 1945 hingga 1962 yang didahului oleh kesepakatan negara-negara yang menang Perang Dunia II untuk

membangun demokrasi di banyak negara Eropa dan Amerika, disusul negara-negara di Amerika Latin, Asia dan Afrika. Gelombang kedua demokrasi ini berakhir dengan munculnya rejim-rejim baru yang berkuasa di beberapa negara di Asia dan Afrika. Gelombang ketiga berawal dari runtuhnya Uni Soviet dan revolusi di Eropa Timur akhir tahun 1990an dan munculnya negara-negara demokrasi di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk di sini Polandia, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Gelombang ketiga ini belum berakhir. Ada tanda-tanda bahwa demokrasi menjadi masa depan kita. Tetapi pertanyaannya sekarang: bagaimana kita menghindari kesalahan seperti halnya invasi militer ke Irak dan Gaza di masa depan? Bagaimana kita membangun demokrasi sambil mengikutsertakan rakyat untuk berpikir bersama pemerintah tentang perbaikan nasib mereka? Apakah Hugo Chavez yang ingin membangun sebuah dunia baru (sosialisme) di Venezuela, George W. Bush yang memaksakan kehendaknya untuk menghancurkan Irak, dan invasi militer Isreal di Gaza menjadi titik tolak untuk sebuah 'arus balik' yang menghancurkan demokrasi?

Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, sebuah jawaban atasnya tidak mudah didapat kecuali jika kita memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pergumulan abadi antara demokrasi dan sang demagog. Oleh para ahli, demagog sudah dikenal sebagai simbol dari pelaku politik dewasa ini yang membawa demokrasi ke arah yang tidak seharusnya. Fenomena 'demagog' adalah fenomena demokrasi. Jika demokrasi dilihat sebagai suatu faktor yang menentukan dalam usaha untuk lolos dari tragedi kemanusiaan, maka sejarah demagog membuka pintu lebar-lebar untuk memahami paradoks kemanusiaan tersebut. Demokrasi dan demagog seakan-akan berjalan bergandengan. Semakin kita mengembangkan demokrasi, semakin intens pula sang demagog menemukan caranya untuk menunjukkan peranannya. Namun, demokrasi dan demagog memiliki kepentingan yang berbeda: kehadiran sang demagog dapat membuat demokrasi, yang menjunjung tinggi martabat manusia, dapat menghancurkan dirinya sendiri. Dengan perkataan lain, demagog merupakan antitesis dari demokrasi: ketika demagog muncul, demokrasi mengalami stagnan dan bahkan mengarahkan diri pada kehancuran. Fenomena demagog

adalah pratanda bahwa rakyat tidak lagi menggunakan kebebasannya untuk memilih pemimpin yang akan menjamin kebebasan, melainkan bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada seorang pemimpin yang akan menjadikan mereka hamba.

Tidak banyak dikatakan tentang fenomena demagog. Secara amat sederhana, iadapat diidentifikasi sebagai seorang pemimpin atau sekelompok pemimpin masyarakat yang muncul secara mendadak mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh elite negarawan yang berdedikasi. Dalam deskripsi Michael Signer, sang demagog adalah tokoh politik yang menyebut dirinya sebagai pemimpin massa yang tanpa ragu-ragu mempertahankan dan memperluas kekuasaannya dengan cara-cara yang ekstrim.² Mereka selalu berbicara tentang tuntutan kemanusiaan untuk kebebasan, namun dalam kenyataannya mereka justru mengabaikan kebebasan itu sendiri. Demokrasi, nampaknya, tidak cukup berhasil dikembangkan jika yang dihadapinya adalah sang demagog yang mengenakan baju kebebasan berbicara. Demokrasi menghancurkan dirinya sendiri, justru ketika para pemimpin yang kita pilih tidak bekerja dalam sebuah sistem yang didasarkan pada kebebasan. Lawan riil demokrasi adalah sang demagog itu sendiri. Karena itu pertanyaan abadi yang muncul adalah bagaimana membuat demokrasi tetap hidup dan berkembang di saat sang demagog yang memiliki kelihaian komunikasi politik memainkan peranan utama.

Tulisan ini pertama-tama bermaksud memetakan hubungan antara demokrasi dan sang demagog. Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memberikan kekuasaan kepada seseorang atas dasar pilihan sebagian besar kelompok masyarakat. Berbeda dari monarki dan oligarki yang memberikan kekuasaan kepada sekelompok orang kaya, demokrasi merupakan sebuah sistem sosial dan politik yang memberikan tempat bagi hak rakyat untuk membuat keputusan. Namun, sejarah demokrasi seakan-akan tidak pernah lepas dari fakta sang demagog. Plato, Alexis de Tocqueville, Leo Strauss, dan Hannah Arendt adalah pemikir politik yang memiliki gagasan yang berbeda-beda tentang demokrasi; dan perbedaan di antara mereka ditentukan oleh

tantangan demagog yang mereka hadapi.

2. SANG DEMAGOG BERBAKAT TIRAN

Plato adalah filsuf pertama yang angkat bicara soal demagog dalam konteks demokrasi. Dalam buku *Republik* ia menulis tentang sang demagog:

Ia yang menikmati isi perut seorang korban manusia yang dicincang halus bersama isi perut korban-korban lainnya dikutuk untuk menjadi seekor serigala..... Dan para pemimpin rakyat tidak bedanya dengan dia; dengan memiliki segerombolan massa yang secara total melayaninya, ia tidak terhalangkan untuk menumpahkan darah para kerabat; dengan cara memberikan tuduhan palsu ia membawa mereka ke pengadilan dan membunuh mereka, membuat hidup seorang manusia lenyap, dan dengan lidah dan bibir jorok ia menjilat darah warga negaranya sendiri; beberapa ia bunuh dan yang lain ia buang, pada saat yang sama mengharapkan penghapusan hutang dan pembagian tanah: dan setelah semuanya ini, apa yang akan menjadi nasibnya? Haruskah ia musnah di tangan musuh-musuhnya atau apakah ia harus menjadi manusia serigala – yaitu, menjadi seorang tiran? (565e-566a)³

Lukisan Plato mengenai sang demagog di atas bersifat ambigu: di satu sisi sang demagog memiliki karisma, namun di sisi lain ia memiliki ambisi yang tak terbendungkan. Karismanya bersumber dari kedekatannya dengan masyarakat. Ia mengenal dengan baik harapan, mimpi dan kecemasan-kecemasan mereka. Masyarakat pun bersedia untuk menanggalkan harga diri mereka sendiri dan taat pada aturan-aturan yang dibuatnya. Bahkan kebijaksanaan hidup mereka sendiri, mereka pertaruhkan padanya. Namun, karisma seorang demagog tidak pernah tulus, tetapi selalu diselimuti oleh ambisi-ambisi yang bisa menghancurkan masyarakat pengabdinya.

Kecurigaan Plato atas demagog berangkat dari pengetahuannya mengenai sejarah munculnya demagog-berbakat-tiran di Yunani (*Republic*, 545), manusia tidak adil, yang hanya mengejar kehormatan (*Republic*, 545),

uang dan tanah (*Republic*, 547).⁴ Buku *Republik* tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan sang demagog berbakat tiran tersebut, kecuali karakter kepemimpinan sang demagog tersebut. Sejarah Yunani menurut laporan Thukidides menjelaskan bahwa pada akhir abad ke-5 sebelum maschi, Athena dikuasai oleh Kleon. Awalnya adalah sebuah debat besar yang menghadirkan ratusan warga Athena di Pnyx, sebuah tempat pertemuan di mana kehidupan demokrasi di Yunani ditentukan. Rapat akbar memfokus pada suatu masalah: bagaimana harus menangani para pemberontak Mytilene, sebuah kota yang sudah diduduki Yunani, namun masih mendapat dukungan Sparta? Menurut Thukidides, rakyat Athena marah dan menghendaki agar pemberontakan Mytilene segera dihentikan. Namun, debat di Pnyx memutuskan untuk tidak mengadakan invansi militer. Menghadapi rakyat yang marah, Kleon berpidato membakar semangat rakyat: “Anda gagal, jika Anda membiarkan diri Anda dengan persuasi. Anda akan membuat sebuah keputusan yang salah. Dan jika Anda membuka diri bagi perasaan belakasih, Anda akan merasa bersalah atas kelemahan yang membahayakan Anda, karena mereka tidak akan mencintai Anda sama sekali.” Menurut Kleon, orang Mytilene telah berlaku arogan, dan orang-orang Athena harus bertindak lebih dahulu sebelum mereka mengalahkan Athena. “Merasa diri suci, membiarkan diri mendengarkan argumen-argumen yang cerdas, dan mendengarkan klaim-klaim moral adalah tiga hal yang bertentangan dengan kepentingan kekuasaan imperial.” Seberapa benar lukisan Thukidides mengenai Kleon, yang jelas, dalam kaca mata Thukidides, Kleon adalah seorang tentara yang tidak memiliki cukup pengertian tentang kemanusiaan. Ia memiliki ambisi yang besar dan kecerdasan yang menggunakan logika sebagai senjata untuk memenangkan hati rakyat.

Namun, ambisinya selalu meminta ongkos kemanusiaan sebagai korban. Korban pertama, sebagaimana dilaporkan Thukidides, adalah Perikles, seorang negarawan yang sering dijuluki sebagai bapak kota Athena karena kecerdasan dan integritas dirinya yang menghargai kebebasan masyarakatnya dan nilai-nilai demokratis lainnya. Di bawah pemerintahannya, Athena menjadi sebuah negara kota yang kuat dan bebas, yang menegaskan kekuasaan berada

di tangan seluruh rakyat, bukan pada sekelompok minoritas penguasa. Namun, menjelang jatuhnya, Perikles dituduh korupsi karena menyalahgunakan dana publik. Dipimpin Kleon, rakyat menarik dukungannya terhadap Perikles. Dan Athena mulai memasuki belantara sang demagog.

Selain Perikles, korban kedua sang demagog adalah Aristophanes, seorang penulis drama yang kaya, brilian dan pendukung demokrasi. Ia mempersalahkan Kleon yang telah menempatkan Athena dalam perang Peloponesia dengan Sparta. Dalam dramanya ia melukiskan Kleon sebagai seorang idiot, seorang yang tidak berharga sehingga menjadi sasaran penghinaan para penonton. Tetapi Kleon menangkap dan menuduhnya sebagai seorang yang menjual negara. Dengan dramanya, demikian Kleon berargumentasi, Aristophanes menfitnah negara di hadapan orang asing. Aristophanes sempat membela diri dalam drama “Orang-Orang Archan”, tetapi drama tersebut tidak memiliki efek politik yang besar. Popularitas Kleon tak dapat dibendung lagi.

Sang demagog, dengan demikian, memiliki akarnya yang kuat pada masyarakat, terutama pada keyakinan-keyakinan masyarakatnya. Lalu, nilai-nilai mana yang mereka butuhkan agar mereka bebas dari dorongan-dorongan yang paling buruk? Perikles dan Aristophanes tampaknya tidak cukup berhasil untuk mengalihkan perhatian rakyat dari dorongan-dorongan buruknya. Akibatnya sang demagog selalu dipilih. Hanya nasib yang bisa mengakhiri hidup Kleon. Ia menjadi korban, tetapi tidak dari rakyat dan musuh-musuh politiknya, melainkan karena kesombongannya sendiri (*hubris*). Kleon dibunuh ketika hendak memperbaiki kota Amphipolis oleh Brasidas, seorang jenderal Sparta yang berada dalam lingkaran Kleon sendiri.

Kematian Kleon tidak berarti kehancuran sang demagog. Tujuh belas tahun setelah kematian Kleon, tepatnya tahun 405 sebelum Masehi, Athena dikalahkan Sparta. Setelah kemenangannya, Sparta membangun pemerintahan Athena di bawah 30 orang bangsawan, yang secara khusus ditugaskan untuk mengembangkan demokrasi. Namun dalam waktu 8 bulan pemerintahannya, kekuasaan tiga puluh orang bangsawan tersebut telah mengeksekusi mati 5000 warga dari jumlah penduduk kota Athena yang hanya berjumlah 25000

orang. Jumlah rakyat miskin pun semakin banyak. Dalam refleksi Plato, kelompok pemimpin yang ia beri identifikasi sebagai oligarki lebih mencintai kehormatan, perang dan uang (*Republic*, 548).

Menghadapi praktek oligarki tersebut, Plato merasa amat kecewa dan mencita-citakan sebuah negara ideal yang dipimpin oleh para penjaga yang berbakat dan terdidik. Kekecewaannya semakin dipertajam ketika pemerintahan oligarkis tersebut menghukum Sokrates dengan alasan merusak mental orang muda dan memperkenalkan dewa yang berbeda dengan keyakinan rakyat Yunani. Plato menunjukkan pembelaannya pada Sokrates dalam dialog *Apologia*. Dalam pandangan Plato, dewan yang terdiri dari 30 orang tersebut telah mengubah rakyat menjadi massa yang tidak memiliki perasaan tanggung jawab sedikit pun ketika mereka memutuskan untuk menghukum Sokrates. Semua kejahatan ini, menurut Plato, merupakan akibat dari “sebuah penataan yang buruk dari rejim yang buruk” (*Republic*, 552e).⁵

Setelah kematian Sokrates, Plato membangun pemikiran filsafatnya sebagai kritik atas praktek-praktek politik otoriter baik yang dilakukan oleh seorang tiran maupun oleh sistem oligarki. Demokrasi pun tak luput dari kritiknya. Dalam buku ke-8 *Republik*, Plato mengawali diskusi politiknya dengan pertanyaan dasar: apakah demokrasi dapat menjamin kebebasan dan kebebasan berbicara? Apakah benar dalam negara demokrasi setiap orang bebas melakukan apa yang ia inginkan? Jika ya, mengapa demokrasi gagal menjadikan setiap manusia menjadi dirinya sendiri? (*Republic*, 557c)

Dalam bentuk perbandingan, Plato melukiskan demokrasi sebagai anak kecil yang kacau pikiran (*Republic*, 558b). Dengan sinis ia menulis tentang orang-orang demokrat sebagai orang yang “dari hari ke hari tunduk pada hawa nafsu; kadang-kadang minum minuman keras, sambil menikmati musik suling; pada kesempatan lain, ia hanya minum air dan menjalankan diet; kadang-kadang ia keluar untuk berolahraga; dan pada kesempatan lain ia bermalas-malas dan mengabaikan semua hal tersebut.” (*Republic*, 561c)

Plato memang memuji orang demokrat sebagai tokoh yang menghargai kesamaan derajat, pluralitas dan perbedaan. Namun, Plato yakin bahwa demokrasi tidak akan pernah berhasil membawa rakyat pada

pengertian tentang keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Nafsu untuk mencari uang, kekuasaan, dan kekayaan selalu menjadi jebakan. Kebebasan yang harusnya dihasilkan dari demokrasi tak pernah tercapai. Sebaliknya, kehausan akan kebebasan tak pernah puas. Dengan tunduk pada hukum perubahan dan hasrat yang tak pernah puas, demokrasi dapat menghancurkan dirinya sendiri, karena mengakibatkan kekosongan kepemimpinan.

Dalam situasi tanpa kepemimpinan inilah sang demagog memulai pekerjaannya, tidak pertama-tama untuk memanipulasi rakyat, melainkan dengan menjadikan dirinya sebagai warga negara biasa, yang mengikuti secara tekun kehendak masyarakat tanpa harus memikirkan sebuah rencana yang pantas dikerjakan masyarakat. Jadi ia menjadi populer tidak terutama karena pemikirannya melainkan karena kedekatannya pada rakyat.

Sang demagog, dengan begitu, adalah seorang demokrat, bahkan kelewat melakukan demokrasi. Hubungannya dengan rakyat amat sangat dekat. Namun, Plato memperkirakan, hubungan semacam ini justru menjadi sebuah strategi seseorang yang berbakat tiran untuk menghancurkan kebebasan. “Kebebasan yang ekstrim tidak dapat membawa seseorang pada suatu masa depan tetapi justru sebuah perubahan kepada penghambaan yang ekstrim atas individu pribadi dan kota. Dan penghambaan yang paling kasar dan kejam adalah hasil dari kebebasan yang paling ekstrim.” (*Republic*, 564a) Hal tersebut terjadi karena rakyat “selalu memiliki kebiasaan untuk menempatkan dan membesarkan satu orang sebagai tokoh yang kuat.” (*Republic*, 565c). Sang demagog menjadi tiran, justru ketika rakyat menjadikan dirinya massa yang tak berpikir kritis lagi.

Lalu, pertanyaan muncul: mengapa sang pemimpin dapat menjadi tiran? Apa dasar transformasi itu? Plato, dalam bahasa seorang Sokrates menjawab secara sederhana: “Seseorang yang sudah menikmati isi perut manusia yang dicincang kecil-kecil dengan potongan-potongan isi perut dari korban lainnya mau tidak mau akan menjadi seekor serigala.” (*Republic*, 565d) Sang demagog, berdasarkan logika hubungannya dengan rakyat yang lapar dan tidak teratur, ditarik untuk melakukan kekerasan, kecanduan darah, memakan daging politik itu sendiri. Plato melukiskan bahwa seorang demagog

“menguasai massa yang patuh dan tidak membatasi dirinya dari kebiasaan menumpahkan darah.” (*Republic*, 565e) Bahkan Plato meramalkan bahwa sang demagog dapat melakukan teror: “dia membawa seseorang ke pengadilan dengan tuduhan palsu dan membunuhnya, dan dengan cara menghilangkan nyawa seorang manusia, lidah dan bibirnya haus akan darah rakyat. Ia dapat memusnahkan beberapa dan membunuh yang lain.” (*Republic*, 565e)

Berubahnya demokrasi menjadi teror menuntut banyak korban, termasuk sang tiran itu sendiri. Plato menjelaskan bahwa sang demagog sendiri menderita konsekuensi moral dari pembunuhan yang ia lakukan. “Dan karena semua hal ini, bukankah seorang manusia akan mengalami nasib untuk dibunuh juga oleh musuhnya atau akan diubah menjadi seekor serigala, karena menjadi seorang tiran?” (*Republic*, 566a) Sang demagog jarang memiliki kedamaian. Sukses politiknya dapat hancur dengan sendirinya, karena itu selalu terjebak dalam siklus sebuah rezim yang lebih luas lagi.

Pemikiran Plato mengenai demokrasi merupakan hasil refleksinya atas sejarah munculnya demagog berbakat tiran dan praktek oligarki di Yunani. Praktek demokrasi, demikian penilaian Plato, tidak dengan sendirinya membawa kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat. Namun, pemikiran Plato ini mendapat kritik cukup tajam. Menurut Karl R. Popper, dengan konsep ‘sang raja filsuf’, Plato menjebak dirinya sendiri dalam kecenderungan totalitarianisme dan mengabaikan keterlibatan kritik publik pada kekuasaan.⁶ Selain itu Plato tidak berani menguraikan kekusutan hubungan antara demokrasi dan demagog. Ia hanya mengunci kedua kenyataan tersebut ke dalam gua dan melemparkan jauh-jauh kunci untuk memahami persoalan politik demokrasi dengan baik. Target politiknya memang ideal: membuat agar setiap orang dalam negara dan masyarakat benar-benar mengalami *eudaimonia* (kebahagiaan).

Tesis Plato terkemuka berbunyi: kebahagiaan rakyat hanya mendapat jaminan dari para penjaga. Filsafat Plato memberikan prioritas pada para ‘penjaga’ untuk mengatur negara. Kontrol absolut datang dari mereka demi kebahagiaan rakyat. Dari elite para penjaga itulah muncullah seorang raja filsuf yang memonopoli pengetahuan, keutamaan dan kekuasaan. Plato yakin bahwa problem demagog dapat dijawab dengan pendekatan kehadiran sang

raja-filsuf yang memiliki pengetahuan, keutamaan, dan sekaligus kekuasaan tersebut.

Argumentasi Plato ini mendapat resonansinya dalam pemikiran Leo Strauss, seorang filsuf Yahudi, kelahiran Frankfurt Jerman tahun 1899. Strauss memiliki pengalaman pahit berkenaan dengan fasisme Hitler. Sama seperti Plato, Strauss mengkritik demokrasi (liberal) dan percaya bahwa politik harus dikembangkan berdasarkan keutamaan hidup, bukan oleh prinsip kebebasan sebagaimana dipikirkan oleh pemikir politik beraliran liberalisme. Untuk mencapai hidup yang berkeutamaan dalam politik, Strauss berpendapat bahwa rakyat pantas untuk diperintah, karena ketidaktahuan dan kegagalan mereka dalam hidup bermasyarakat. Kelompok yang pantas untuk menentukan politik dan dapat memberikan koreksi pada masyarakat adalah kelas masyarakat yang lebih tinggi yang oleh Strauss disebut dengan kelas *the gentlemen*, sekelompok orang bijaksana yang memiliki budi pekerti.

Dalam logika yang sama dengan Plato, Strauss melihat bahwa fenomena munculnya demagog merupakan sebuah indikasi dari lenyapnya otoritas *the gentlemen*. Kelompok-kelompok inilah yang seharusnya menuntut loyalitas masyarakat. Jika mereka tidak ada maka manusia demagog merupakan penggantinya, yang dapat memimpin masyarakat ke arah yang salah, yang membuat rakyat dengan mudah meninggalkan kebijaksanaan dalam politik. Sementara itu rakyat tidak memiliki kecenderungan untuk menentukan pilihannya sendiri kepada kebaikan kecuali mendapat pencerahan dari *the gentlemen*. “Baik rakyat sebagai keseluruhan maupun tiap-tiap individu sama-sama membutuhkan arahan; rakyat harus diajar untuk mengetahui apa yang ia inginkan, dan setiap individu, yang memiliki kecenderungan kodrati untuk memperhatikan kepentingannya sendiri, harus diubah untuk menjadi warga negara yang tidak ragu-ragu lebih memilih kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.”⁷ Jadi rakyat tidak memiliki kemampuan untuk menjadi bijaksana. Mereka harus ‘diajar’ dan ‘diubah’ menjadi warga negara yang baik. Dan pengajaran dan perubahan tersebut hanya dapat diharapkan dari elite yang bijaksana, yang dalam praktek penyelenggaraan negara termasuk legislator atau bapak-bapak bangsa yang memiliki inteligensi superior. Hanya

merekalah yang dapat meyakinkan masyarakat tentang kebaikan undang-undang yang dapat mengubah setiap individu dari kodratnya sebagai manusia alamiah menjadi manusia warga negara.

Strauss, dengan argumentasi ini, benar-benar meneruskan pemikiran Plato. Ia yakin garis pemikiran Plato dapat benar-benar menjawab persoalan paling ekstrim yang ia alami pada perang dunia ke-2 dalam pemerintahan Nazi. Jika Plato mengkritik demokrasi karena demokrasi menghasilkan Kleon dan pemerintahan oligarki yang terdiri dari 30 orang tua-tua, maka Strauss mengkritik demokrasi (berdasarkan konstitusi Weimar) karena demokrasi menghasilkan Hitler, sang pembunuh massal. Strauss sungguh-sungguh mencurigai demokrasi. Dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Political Philosophy: Ten Essays by Leo Strauss*, ia malah mencurigai demokrasi sebagai sumber demagog. Ia melihat, tujuan demokrasi bukanlah keutamaan melainkan kebebasan, yaitu kebebasan baik untuk hidup secara mulia atau sesuai selera masing-masing. Dengan prinsip ini, setiap orang memiliki hak untuk kebebasan politik, untuk menjadi anggota pemerintahan dan legislasi hanya karena setiap orang memiliki martabat sebagai makhluk moral. Ini berarti selalu ada fusi antara yang tidak terdidik dan terdidik, antara yang bijaksana dan tidak bijaksana, antara yang baik dan yang jahat. Dalam fusi berdasarkan prinsip kesamaan status moral inilah muncul sang demagog.⁸

Bagi Strauss, demokrasi justru membuat kesalahan fatal ketika ia menghapus begitu saja perbedaan yang tegas antara yang terdidik dan tak terdidik, antara yang bijaksana yang pantas memerintah dengan yang tidak bijaksana, antara yang baik dan yang jahat. Dalam wilayah politik, perbedaan tersebut harus diperhatikan. Demokrasi, menurut Strauss, tidak memperhatikan perbedaan ini. Dalam bahasa Carl Schmitt, demokrasi telah membuat penyamarataan antara yang memerintah dan yang diperintah, antara yang bijaksana dan yang tidak bijaksana. Yang memerintah dan yang diperintah memiliki kedudukan dan status yang sama.⁹ Dalam pandangan Strauss, kekerasan politik sang demagog muncul justru ketika perbedaan

antara yang bijaksana dan yang tidak bijaksana, antara yang baik dan yang jahat tidak diperhatikan dengan baik dalam politik.

3. DEMOKRASI VS DEMAGOG

Pendekatan yang memberikan kepercayaan pada demokrasi sebagai sebuah langkah politik menjawab persoalan demagog dapat ditemukan dalam karya Aristoteles berjudul *Politik*.¹⁰ Berdasarkan pengalamannya sebagai guru dan penasehat Raja Aleksander Agung, Aristoteles yakin bahwa persoalan demagog bukanlah persoalan elite politik, melainkan persoalan rakyat. Karena itu rakyatlah yang harus diperkuat dengan pendidikan dan ketaatan pada hukum. Jika Plato mengusulkan agar demokrasi pun harus dikontrol oleh para penjaga dan sang raja-filsuf, Aristoteles mencoba mengajak kita untuk mengerti inti kekuatan demokrasi itu sendiri, sebagai jawaban atas persoalan demagog. Membandingkan demokrasi dan oligarki, Aristoteles menulis: “Prinsip yang mengatakan bahwa yang banyak harus menjadi yang utama lebih daripada beberapa orang yang baik merupakan salah satu prinsip yang mengandung unsur kebenaran.” (*The Politics*, 1281). Yang banyak memiliki otoritas lebih tinggi daripada beberapa orang saja.

Dengan argumentasi ini, Aristoteles secara singkat ingin menegaskan bahwa ‘banyak kepala lebih baik daripada satu.’ Menurut prinsip ini rakyat harus diberikan kekuasaan politik, sekurang-kurangnya diberikan kesempatan untuk memilih pimpinan mereka yang pada akhirnya dapat bertindak atas nama mereka. Intinya di sini tidaklah berarti bahwa keputusan kolektif pada dasarnya lebih baik, karena rakyat akan memilih dengan cara mereka masing-masing, tetapi bahwa keputusan kolektif yang diambil berdasarkan pengalaman akan lebih benar jika diberikan oleh banyak orang, daripada yang bisa ditawarkan oleh beberapa elite. (*The Politics*, 1282) Partisipasi dalam memberikan penilaian dan keputusan kolektif, sekurang-kurangnya dapat mengurangi unsur permusuhan dan kecurigaan dalam sebuah negara.

Dukungan Aristoteles atas demokrasi tersebut tentu tidak tanpa

syarat. Dalam analisisnya mengenai bentuk-bentuk negara, Aristoteles sendiri membuat distingsi yang tegas antara bentuk pemerintahan yang benar: monarki, aristokrasi, dan pemerintahan konstitusional dan bentuk deviasi dari pemerintahan yang benar ini adalah: tirani dari monarki, oligarki dari aristokrasi, dan demokrasi dari pemerintahan yang konstitusional (*The Politics*, 1289). Menurut klasifikasi bentuk pemerintahan tersebut, demokrasi merupakan bentuk deviasi dari pemerintahan yang benar, namun masih dapat diterima (*tolerable*). Distingsi ini perlu diperhatikan karena menurut Aristoteles demokrasi dapat menjadi masalah jika tidak didasarkan pada hukum. Aristoteles yakin bahwa mengandalkan saja pada demokrasi tidaklah cukup. Hukum bahkan yang menjadi prioritas, jika tidak, negara dapat dikorbankan oleh kekuatan massa (*The Politics*, 1292).

Argumentasi Aristoteles mengenai pentingnya hukum tidak lepas dari apa yang dicemaskan Plato bahwa demokrasi menjadi sumber munculnya sang demagog. Aristoteles menulis: “Karena dalam demokrasi yang berbasiskan hukum, warga negara mendapat tempat istimewa, dan di sana tidak ada demagog. Tetapi di mana hukum tidak berkuasa, di sana demagog muncul” (*The Politics*, 1292). Jadi, dengan perkataan lain, hukum menjadi sebuah syarat penting dalam demokrasi.

Dalam perspektif ini, lenyapnya hukum yang independen dapat menjadi pemicu munculnya demagog yang akan datang untuk memenangkan hati rakyat. Demokrasi tanpa kontrol hukum dapat berubah menjadi tirani mayoritas. Dan rakyat pun dapat dengan mudah terpecah belah dalam rangkulan sang demagog (*The Politics*, 1292). Kekuasaan sang demagog pun semakin lama semakin kuat karena rakyat yang memiliki semua sudah melanggar hukum yang mereka tetapkan sendiri. Dalam hubungan afeksi dengan sang demagog, rakyat sendiri dapat menghancurkan hukum. Dan ketika sang demagog memiliki suara rakyat, rakyat tidak pernah memiliki apa pun lagi, termasuk suaranya sendiri (*The Politics*, 1293).

Menurut Michael Signer, pemikiran Aristoteles tentang rakyat sebagai subjek politik tidak hanya penting bagi pengertian kita tentang demokrasi, tetapi juga penting untuk mengerti daya tahan rakyat terhadap demagog.

Dalam hal yang kedua inilah Aristoteles berbicara tentang 2 kekuatan rakyat dalam demokrasi. Yang pertama adalah daya tahan kultural. Manusia warga memiliki kebijaksanaannya sendiri. Ia adalah subjek yang memiliki aspirasi dan pikiran sendiri yang tidak bisa didikte. Alexis de Tocqueville, dalam bukunya yang berjudul *Democracy in America*, mengidentifikasi perkembangan demokrasi di Amerika Serikat sebagai gerakan kultural, dalam arti, demokrasi berkembang karena diajarkan dan dimurnikan untuk menghindari godaan demagog. Dalam pengamatannya, sukses demokrasi di Amerika Serikat ditentukan oleh kultur politik yang menghargai kebebasan, persamaan, dan persaudaraan atau, dalam istilah Alexis de Tocqueville, oleh *mores*, yang isinya adalah ‘kebiasaan intelektual dan moral sebuah masyarakat’ yang mencintai demokrasi, stabilitas, persamaan, dan kebebasan.¹¹

Namun, Aristoteles juga mengakui bahwa rakyat selalu rentan terhadap sepak terjang demagog, sehingga mudah masuk dalam jebakan mereka. Dengan alasan ini, daya tahan kedua adalah prinsip *the rule of law*. Penghargaan atas prinsip-prinsip demokrasi dan penolakan terhadap demagog hanya menjadi efektif jika menjadi bahasa hukum. Rakyat sendiri membangun etos taat pada hukum, sehingga tidak mengisinkan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kekuatan rakyat dalam menghadapi sang demagog, tidak lagi melalui seni drama sebagaimana dilakukan Aristophanes menghadapi Kleon, karena seni drama memiliki efek politik yang kecil, tetapi melalui prinsip tunduk pada aturan, pada stabilitas, dan pada kebaikan yang lebih besar.¹²

4. KONSTITUSIONALISME

Pemikiran demokrasi Aristoteles yang memberikan perhatian pada prinsip *the rule of law* telah mengalami perkembangan yang besar. Bahkan pemikirannya ini menjadi inspirasi dari pemikiran beberapa pemikir politik modern seperti Thomas Jefferson dan de Tocqueville. Popularitas pemikiran Aristoteles tersebut tidak hanya karena menjadi sebuah antitesis dari pemikiran

Plato yang tidak percaya pada kemandirian rakyat ketika harus menghadapi tantangan Kleon dan perang saudara di Yunani. Sebaliknya, keunggulan Aristoteles atas Plato yang lebih percaya pada kebijaksanaan sang raja filsuf lebih disebabkan karena Aristoteles mengalihkan perhatian dari sang raja filsuf kepada kemampuan rakyat untuk taat pada hukum dan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam menghadapi masalah-masalah negara yang besar.

Dalam garis pemikiran Aristoteles inilah, demokrasi dapat dilihat sebagai sebuah titik tolak bagi usaha-usaha politik untuk mencegah kekerasan politik yang dilancarkan para demagog. Tetapi, menjadi pertanyaan sekarang: apakah prinsip-prinsip demokrasi masih mampu menjadi jawaban atas persoalan demagog modern yang muncul dalam wajah yang lebih radikal dan total seperti Adolf Hitler?¹³ Bagaimana kita dapat memberikan penjelasan terhadap kejahatan perang yang mengakibatkan lebih dari 50 juta manusia meninggal dan jutaan manusia hidup tak memiliki harapan karena kemiskinan dan trauma perang dunia kedua?¹⁴ Apa yang bisa kita katakan jika perang dan ‘pembersihan etnis’ sebagaimana dialami Muslim Bosnia masih terus terjadi? Bagaimana kita menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknik turut membantu sang demagog untuk mengintensifkan kekerasan politik yang membawa akibat yang fatal bagi kehidupan pada umumnya dan kemanusiaan pada khususnya?¹⁵

Pertanyaan-pertanyaan ini merefleksikan sebuah tantangan besar yang dialami banyak negara berkenaan dengan apa yang disebut Hannah Arendt kekerasan politik dan totalitarianisme modern. Dalam usahanya untuk memahami akar-akar totalitarianisme, Hannah Arendt, seorang filsuf Amerika Serikat kelahiran Jerman, menulis dalam bukunya yang berjudul *The Origins of Totalitarianism*. “Penderitaan, yang memang sudah amat banyak di dunia, bukanlah masalahnya, bukan juga sejumlah besar korban. Kodrat manusia itu sendiri menjadi taruhannya.”¹⁶ Pernyataan ini tentu tidak berarti menyepelkan pengalaman pahit yang dialami banyak manusia di banyak negara. Sebagai seorang filsuf, Arendt mencoba merefleksikan akibatnya yang paling mendasar. Manusia, demikian Arendt, diubah menjadi ‘sejenis binatang manusiawi’.¹⁷ Sebagai sebuah kejahatan terhadap kodrat manusia,

totalitarianisme memiliki beberapa elemen, di antaranya adalah ekspansi kekuasaan dan rasisme. Dorongan untuk melakukan ekspansi tak terbatas telah membangkitkan imperialisme. Meskipun ekspansi bangsa-bangsa Eropa ke Afrika dan Asia memiliki motif ekonomi, namun ekspansi ekonomi tersebut tidak bisa lepas dari hasrat abadi akan kekuasaan, sehingga ekspansi ekonomi berubah menjadi ekspansi politik. Birokrasi dan agen-agen rahasia merupakan pelayan-pelayan baru ekspansi imperialisme tersebut. Ekspansi kekuasaan tersebut pada akhirnya menghancurkan negara-bangsa yang merupakan sebuah institusi yang dimiliki bangsa-bangsa jajahan dengan tatanan legal yang menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Rasisme, dalam pengertian Arendt, merupakan sebuah bentuk imperialisme, karena rasisme merupakan sebuah bentuk eksploitasi dan perendahan bangsa atau ras yang dikuasai. Dalam praktek imperialisme dan rasisme, totalitarianisme merendahkan manusia menjadi sama dengan binatang.

Secara lebih khusus, totalitarianisme menjadi radikal justru ketika totalitarisme, dalam bentuk rasisme membuat manusia menjadi mayat hidup: manusia yang tidak lagi memiliki identitas dan tidak lagi menjadi manusia dalam pluralitas individual, di mana masing-masing benar-benar berbeda satu sama lain dan mampu menciptakan sesuatu yang baru. Dalam pandangan Arendt, Hitler, sang rezim yang totaliter, benar-benar jahat, karena ia melakukan apa saja untuk membangun diri sebagai sebuah bentuk dominasi yang sedemikian intens sehingga semua yang menjadi ciri sesungguhnya manusia dapat dihancurkan. Hitler dilihat sebagai demagog yang totaliter, karena dengan propagandanya ia berhasil menarik perhatian rakyat, namun pada saat yang sama ia melakukan ‘pembunuhan atas pribadi manusia’.¹⁸ Sasaran terakhir dari totalitarianisme adalah kematian sang manusia moral. Ia adalah pembunuh jiwa dan sekaligus penyangkal identitas yang unik dari tiap-tiap individu. “Sekali pribadi moral dibunuh, satu-satunya hal yang masih dapat mencegah manusia untuk menjadi mayat hidup adalah proses diferensiasi individu dengan segala identitasnya yang unik.”¹⁹

Melihat permasalahan totalitarianisme modern dewasa ini, Arendt, sebagaimana halnya Aristoteles melihat demokrasi sebagai pemecah masalah.

Namun, ia juga menambahkan bahwa demokrasi dewasa ini memiliki tugas yang lebih luas dari yang pernah dibayangkan oleh Aristoteles. Jika Aristoteles melihat tugas demokrasi masih memfokus pada usaha menumbuhkan kepercayaan dan harga diri warga, mendorong tanggung jawab individu pada pilihan politik, serta mengembangkan suara hati warga untuk taat pada konstitusi, Arendt menambahkan bahwa yang amat dibutuhkan sekarang adalah agar pengembangan demokrasi diarahkan pada pertumbuhan semangat konstitusionalisme. Dalam bukunya yang berjudul *On Revolution*, Arendt menyatakan bahwa semangat konstitusionalisme merupakan sebuah disiplin yang harus ditegakkan oleh para pejuang demokrasi agar negara memiliki kekuasaan yang terbatas berdasarkan undang-undang sebagaimana dikehendaki rakyat.²⁰ Karena basis konstitusionalisme adalah kebebasan, hak-hak dasar rakyat sebagai warga negara, dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka tujuan konstitusi tidaklah sekedar membatasi kekuasaan, melainkan menciptakan kekuasaan, secara khusus menempatkan kembali kekuasaan sebagai pusat bagi komunikasi dan dialog antara warga.²¹

Kepercayaan Arendt terhadap konstitusionalisme ini dirumuskan dengan cara lain dalam konsep natalitas, artinya: kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Arendt menjelaskan natalitas adalah kemampuan yang ada pada setiap orang untuk menghasilkan sesuatu: kata, gagasan, dan tindakan. Sekaligus natalitas menjadikan kita benar-benar manusia, sebab yang berada dalam diri kita sendiri, sesuatu yang penting bagi kebebasan, hati nurani dan pikiran kita. Arendt menulis: “Kebebasan sebagai kemampuan yang ada dalam diri manusia adalah sama dengan kemampuan kita untuk memulai, sama halnya dengan kebebasan sebagai sebuah realitas politik sama dengan sebuah ruang gerak antara manusia.”²² Lawan dari natalitas adalah totalitarianisme, karena ia menghancurkan individualitas dan spontanitas sebagai kekuatan manusia untuk memulai sesuatu yang baru.²³ Begitu juga jika kita berbicara tentang demagog sekaliber Hitler. Target utama dari setiap demagog yang totalitarian adalah kematian natalitas. Siapa saja yang menginginkan dominasi total, demikian Arendt menjelaskan, pasti akan

melikuidasi semua spontanitas.²⁴ Arendt yakin bahwa spontanitaslah yang dapat menghancurkan tirani dan demagog.

Konstitusionalisme, dengan demikian, merupakan sebuah jawaban atas permasalahan totalitarianisme yang dikembangkan demagog dan tiran sekaliber Hitler dan Stalin. Hal ini tentu tidak pertama-tama, sikap taat aturan, melainkan sebuah revolusi untuk kebebasan. Dengan mengambil Revolusi Perancis sebagai model, Arendt tidak melihat revolusi sebagai sebuah pergumulan untuk kebebasan tetapi sebuah fondasi bagi kebebasan. Jadi revolusi bukan suatu tindakan mengatasi sesuatu; sebaliknya tugas revolusi adalah untuk menghidupkan kembali sebuah ide, sebuah restorasi atas apa yang pernah hilang sehingga menjadi tampak kembali sesuai dengan aslinya. Semangat konstitusionalisme, dengan demikian, merupakan sebuah revolusi yang bertujuan restorasi kebebasan – menemukan kembali hak dan kebebasan dalam pemerintahan yang terbatas. Karena itu restorasi, revolusi dan konstitusionalisme memiliki akar yang sama, yaitu: kebebasan.²⁵

Dengan demikian, Hannah Arendt tidak hanya mengikuti Aristoteles, tetapi melangkah lebih jauh dari Aristoteles ketika ia berbicara tentang demokrasi konstitusional. Ia mengatakan bahwa demokrasi harus berkembang dalam kerangka sebuah konstitusi. Tanpa basis konstitusi, sang demagog yang menjadi pelaku dan sekaligus pendukung demokrasi dapat menjadi anarkis. Keberhasilan demokrasi, tidak ditentukan oleh faktor perubahan ekonomi dan tanggung jawab masyarakat, melainkan karena konstitusinya yang menginspirasi masyarakat untuk mengembangkan demokrasi.

5. KESIMPULAN

Barangkali tidak berlebihan jika dikatakan di sini bahwa pemikiran Hannah Arendt mengenai demokrasi dalam semangat konstitusionalisme mengubah arah pemikiran kita tentang demokrasi selama ini: dari demokrasi sebagai struktur pemerintahan formal kepada demokrasi sebagai kultur atau cara hidup publik pada umumnya. Inti demokrasi menurut Arendt bukanlah

sejumlah aturan, sejumlah lembaga dan birokrasi, serta sejumlah mekanisme *checks and balances*, melainkan genius demokratis yang tinggal menetap dalam hati dan pikiran rakyat, yang menjadi satu-satunya tembok pertahanan melawan sang demagog tiran.

Menurut pandangan ini konstitusionalisme bukanlah sebuah prosedur legal dalam hal pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan sebuah budaya politik yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat biasa. Budaya politik tersebut bertujuan menumbuhkan pengertian individual atas harga dirinya dan tanggungjawabnya bagi sukses demokrasi dan menjadi kekuatan politik untuk melawan mereka yang mengumpulkan kekuasaan dengan cara melanggar hukum. Karena itu konstitusionalisme merupakan sebuah alat kontrol atas demagog yang berusaha mencari kekuasaan dengan cara-cara tidak adil. Tujuan akhirnya adalah agar rakyat sendiri tetap memiliki natalitas: kemampuan kreatif untuk melahirkan sesuatu yang baik bagi masyarakatnya.

Dalam perspektif konstitusionalisme inilah, pengembangan demokrasi di mana pun tidak dapat dipaksakan dari luar. Sebaliknya, demokrasi hanya dapat tumbuh dalam kerja sama dengan rakyat untuk memahami hak politik mereka, dalam komunikasi visi mengenai kebebasan politik dan pertukaran gagasan antara warga, serta dalam toleransi terhadap pandangan-pandangan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Terutama, pengembangan demokrasi berarti pengakuan pada pluralisme. Konstitusionalisme Arendt bertujuan untuk mendukung kemanusiaan universal, tetapi kemanusiaan tersebut bukanlah sebuah kata benda abstrak, melainkan konkret berdasarkan pluralitas kultural.

Demokrasi konstitusional dengan demikian tidak dapat lepas dari seluruh pengalaman masyarakat dalam mencari kebebasan dalam bekerja, berpikir, berbicara, dan bertindak bersama dengan pemerintahan mereka. Bukan mustahil bahwa dalam rangka mencari kebebasan tersebut, masyarakat akan berhadapan dengan paradoks manusia yang pada gilirannya dapat menghasilkan demagog berkuasa. De Tocqueville pernah meramalkan bahwa demokrasi adalah sebuah jalan yang banyak diikuti dalam segala zaman;

tetapi itu tidak berarti bahwa demokrasi selalu berhasil. Jika sejarah selalu memberikan pelajaran, maka pelajaran yang paling bermakna adalah bahwa sang demagog selalu menunggu. Ia selalu menampilkan diri dalam sebuah kecerdikan yang menawan. Secara tak tersadarkan semua selalu terpesona padanya. Dalam dirinya ada hasrat akan kekuasaan yang dapat menyusup masuk dalam celah-celah nilai, gagasan, dan opini. Ia tidak pernah pergi dan lenyap. Sang demagog tersebut selalu berada bersama rakyat. Dengan tingkat kecerdasan tertentu, ia meyakinkan pendengarnya bahwa ia selalu berpikir dan merasakan seperti mereka. Ia dapat meminjamkan suaranya kepada rakyat dan berperilaku sebagai perayu massa. Ia tidak akan pernah menegaskan pendapat pribadinya, tetapi pernyataan-pernyataannya mengalir bersama dengan pendapat pendengarnya. Ia memiliki kelenturan yang dibangun melalui konstruksi khazanah politik yang ambigu supaya kata yang sama bisa ditafsirkan sesuai dengan harapan pendengar yang menerimanya.²⁶

Hanya kewaspadaan masyarakat yang dapat menjauhkannya dan meningkatkan kebebasan. Sikap ini tidak didasarkan pada kecurigaan personal pada demagog sebagai warga negara, melainkan pada pengalaman historis tentang kekerasan itu sendiri. Arendt rupanya benar ketika mengatakan: “Di mana kekerasan menguasai secara absolut, sebagai contoh dalam kamp-kamp konsentrasi rezim-rezim totaliter, tidak hanya hukum yang tak bersuara, tetapi juga segala sesuatu dan setiap orang.”²⁷ Kekerasan itu selalu mematikan. Dengan ciri ini kekerasan membuat sesuatu yang politik menjadi tidak politik. Kekerasan selalu menghancurkan solidaritas yang biasa dibangun melalui bahasa dan dialog yang amat sangat penting dalam kegiatan politik.²⁸

Karena basisnya adalah tanpa-bahasa, maka kekerasan tidak pernah menokohkan orang. Kekerasan selalu melawan demokrasi: setiap orang tidak dianggap siapa-siapa. Akibatnya, kekerasan menciptakan isolasi. Bentuknya yang paling ekstrim adalah tirani di mana satu lawan semua. Setiap masyarakat dapat membantu dirinya untuk menyelamatkan demokrasi dari pergumulannya yang abadi dengan demagog. Jika berhasil, maka itu adalah sebuah langkah masyarakat tersebut merintis jalan menuju kebebasan yang benar.

CATATAN AKHIR

- 1 Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth century*. (Tulsa: University of Oklahoma Press, 1991), hal. 16-26
- 2 Michael Signer, *Demagogue: The Fight to Save Democracy From its Worst Enemies* (New York: Palgrave Macmillan 2009), hal. 21
- 3 Teks diterjemahkan dari *The Republic of Plato*, Book VIII, sebuah terjemahan Inggris oleh Allan Bloom (New York: Basic Books Inc., 1968).
- 4 Ulasan mengenai latar belakang historis mengenai Kleon dapat dibaca dalam Michael Signer, *Demagogue: The Fight to Save Democracy from its Worst Enemies, op.cit.*, hal. 38-57
- 5 Menurut penafsiran Alan Bloom, setiap rejim selalu memiliki karakter tertentu yang pada gilirannya akan dicontohkan oleh rakyatnya. Cara hidup rakyat, dengan demikian, identik dengan cara hidup pimpinannya. Hal ini terjadi karena setiap rejim menentukan karakter undang-undang, pendidikan, kepemimpinan, perkawinan dan keluarga. Karena itu, jika pimpinan memiliki karakter jahat, maka rakyatnya pun akan menjadi jahat. Rakyat identik dengan pimpinannya. *The Republic of Plato, op.cit.*, hal. 414
- 6 Karl R. Popper, *The Open Society and Its Enemies* (London: Routledge 1945)
- 7 Leo Strauss, *Natural Right and History* (Chicago: University of Chicago Press, 1965), hal. 287. Dikutip dari Michael Signer, *Demagogue, The Fight to Save Democracy from Its Enemies, op.cit.*, hal. 157
- 8 *Ibid.*, hal. 157-158
- 9 Carl Schmitt, *Der Begriff des Politischen* (Berlin: Duncker & Humboldt 1963), hal. 26
- 10 Sebagai referensi saya menggunakan buku Aristotle, *The Politics* (London: The Penguin Books 1992)
- 11 Alexis de Tocqueville, *Democracy in America* (Chicago: University of Chicago Press 2000), hal. 295 dan 275. Dikutip dari Michael Signer, *Demagogue, The Fight to Save Democracy from Its Enemies, op.cit.*, hal. 103-105
- 12 Michael Signer, *Demagogue: The Fight to Save Democracy from its Worst Enemies, op.cit.*, hal. 67
- 13 Selain Hitler, Hannah Arendt menyebut Stalin sebagai contoh dari apa yang disebut dengan totalitarianisme. Namun harus juga dikatakan bahwa Stalin bukanlah seorang demagog. Ia adalah seorang pemimpin yang muncul di luar basis demokrasi. Sebaliknya, Hitler justru muncul sebagai tokoh yang muncul dari hasil pilihan rakyat berdasarkan Konstitusi Weimar tahun 1933.
- 14 Lihat Hans Kung dan Dieter Senghaas (editor), *Friedenspolitik, Ethische Grundlagen internationaler Beziehungen* (Munchen: Piper 2003), hal. 18
- 15 Pertanyaan ini menjadi pertanyaan Bertrand Russell dalam bukunya yang berjudul *The Impact of Science on Society*. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul *Dampak Ilmu Pengetahuan atas Masyarakat*.
- 16 Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (London: Secker and Warburg, 1951), hal. 433. Dikutip dari Margareth Canovan, *Hannah Arendt, a Reinterpretation of Her Political Thought* (New York: The Press Syndicate of the University of Cambridge, 1992), hal. 23
- 17 *Ibid.* hal. 426
- 18 *Ibid.*, hal. 451
- 19 *Ibid.*, hal. 453

20 Hannah Arendt, *On revolution* (London: Penguin Books 1977), hal. 143. Pada halaman 145, Arendt mengutip kalimat Thomas Paine yang terkenal: 'A constitution is not the act of a government, but of a people constituting a government.' Jadi rakyatlah yang memberikan konstitusi kepada pemerintah, tidak sebaliknya.

21 *Ibid.*, hal. 149

22 Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism, op.cit.*, hal 473

23 *Ibid.*, hal. 455

24 *Ibid.*, hal. 456

25 Hannah Arendt, *On Revolution, op.cit.*, hal. 153

26 Haryatmoko, *Etika Komunikasi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2007), hal. 70

27 Hannah Arendt, *On Revolution, op.cit.*, hal. 18.

28 Remi Peeters, "Against Violence, but Not at Any Price: Hannah Arendt's Concept of Power," *Ethical Perspectives: Journal of the European Ethics Network* 15. No. 2 (2008): 169-193

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, Hannah. (1977) *On revolution*. London: Penguin Books.
- _____. (1951) *The Origins of Totalitarianism*. London: Secker and Warburg.
- Aristotle. (1992) *The Politics*. London: The Penguin Books.
- Bloom, Allan (Penterjemah). (1968) *The Republic of Plato*. New York: Basic Books Inc.
- Canovan, Margareth. (1992) *Hannah Arendt, a Reinterpretation of Her Political Thought*. New York: The Press Syndicate of the University of Cambridge.
- De Tocqueville, Alexis. (2000) *Democracy in America*. Chicago: University of Chicago Press
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi*. (2007) Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Huntington, Samuel P. (1991) *The Third Wave*. Tulsa: University of Oklahoma Press.
- Kung, Hans dan Senghaas, Dieter (editor). (2003) *Friedenspolitik, Ethische Grundlagen internationaler Beziehungen*. Munchen: Piper.
- Peeters, Remi. (2008). "Against Violence, but Not at Any Price: Hannah Arendt's Concept of Power," *Ethical Perspectives: Journal of the European Ethics Network* 15. No. 2.
- Popper, Karl R. (1945) *The Open Society and Its Enemies*. London: Routledge.
- Russell, Bertrand. (1994) *Dampak Ilmu Pengetahuan atas Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Schmitt, Carl. (1963) *Der Begriff des Politischen*. Berlin: Duncker & Humbolt.
- Signer, Michael. (2009) *Demagogue: The Fight to Save Democracy From its Worst Enemies*. New York: Palgrave Macmillan.
- Strauss, Leo. (1965) *Natural Right and History*. Chicago: University of Chicago Press.